



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE
TAHUN 2025 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan ...

Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 - 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan

didalamnya ...

didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.

5. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 – 2025
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2019-2024.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

14. Anggaran ...

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
19. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
20. Daerah adalah Kabupaten Ende.
21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
22. Bupati adalah Bupati Ende.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
24. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
26. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.

BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

(3) Perencanaan ...

- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang perencanaan baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :
- a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setiap tahun.
 - b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) di setiap bidang.
 - c. Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Ende.
 - d. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
 - e. Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Pasal 5

- (1) Renstra ...

- (1) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 memuat dan kebijakan serta program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berpedoman pada Perubahan RPD Tahun 2025-2026.
- (2) Sistematika Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

BAB IV Tujuan dan Sasaran

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

Pasal 6

Sistematika Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 7

- (1) Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melibatkan semua personil aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kebutuhan-kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 8

- (1) Rancangan Akhir Renstra disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Bappeda menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada semua, Pejabat Pengawas Administrator dan Pelaksana lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KABUPATEN ENDE

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 9

- (1) Kepala Baappeda melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
- a. kebijakan perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 10

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda melalui Bagian Sekretariat, Fungsional Perencana Ahli Muda sub koordinator substansi program, evaluasi dan pelaporan yang diketahui oleh Sekretaris.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 11

- (1) Kepala ...

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Program Bappeda; dan
 - b. Hasil pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang/Bagian dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Badan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing Bidang/Bagian dalam rangka pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 13

- (1) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Rensra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

Pasal 15

Dengan ...

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 19 Maret 2024



Diundangkan di Ende
pada tanggal 19 Maret 2024



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH LINGKUP
KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 -2024

ISI DAN URAIAN RENSTRA

A. DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL I

PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN 2019-2024 II

ISI DAN URAIAN RENSTRA XI

A. DAFTAR ISI XI

B. DAFTAR TABEL XII

C. DAFTAR GAMBAR XII

KATA PENGANTAR XIV

BAB I. PENDAHULUAN 1

1. 1. LATAR BELAKANG 1

1. 2. LANDASAN HUKUM 1

1. 3. MAKSUD DAN TUJUAN 3

1. 4. SISTEMATIKA PENULISAN 3

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN ENDE 5

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 5

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH 11

2.2.1 Sumber Daya Manusia (ASN) 11

2. 2. 2. Kondisi Sarana dan Prasarana 13

2. 2. 3. Keuangan 16

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 17

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN BAPPEDA KABUPATEN ENDE 29

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 31

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 31

3.2. ISU-ISU STRATEGIS 31

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN 33

4.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026 33

4.1. 1. Tujuan: 33

4.1.2. Sasaran: 33

4.2. CASCADING KINERJA 33

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 35

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 36

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 48

7.1. RUMUSAN IKU BAPPEDA KAB. ENDE BESERTA INDIKATOR DAN TARGET 48

BAB VIII. PENUTUP 50

SK TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2019-2024 51

B. DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Kondisi Aset Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2023 14

Tabel 2. 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Bappeda Kabupaten Ende 2022-2023 17

Tabel 2. 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Ende 18

Tabel 2. 4. Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten
Ende Tahun 2022 – 20223 21

Tabel 2. 5. Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program Kegiatan Pelayanan Perangkat Daerah
Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2022 – 2022 22

Tabel 3. 1. Pemetaan Permasalahan Bappeda Kabupaten Ende 31

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Ende 33

Tabel 5. 1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 35

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kabupaten Ende Tahun
2024 – 2026 37

Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Bappeda Kab. Ende yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kab. Ende
Tahun 2025-2026 48

Tabel 7. 2. Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kab. Ende Tahun
2025_2026 48

C. DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Ende 11

Gambar 2. 2. ASN Bappeda Kab. Ende berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 12

Gambar 2. 3. ASN Bappeda Kab. Ende berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020 12

Gambar 2. 4. Komposisi Kebutuhan Pegawai di Bappeda Kabupaten Ende 13

Gambar 2. 5. PNS yang telah mengikuti Diklat Fungsional Perencana 13

Kata Pengantar

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende periode tahun 2025 sampai dengan 2026 merupakan salah satu panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende untuk 2 (dua) tahun.

Renstra ini merupakan Penjabaran dari Teknokratik RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu Perencanaan yang terpadu yang berorientasi pada hasil.

Mengingat hal tersebut, maka semua bidang, pimpinan dan staf Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. Ende harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*).

Demikian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende periode tahun 2025 sampai dengan 2026, semoga dapat memberikan manfaat dalam berkarya dan berorientasi dalam pembangunan guna memajukan Kabupaten Ende yang kita cintai ini.

M Kepala Bappeda Kabupaten Ende, p


ANDREAS WORHO, ST. MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641020 199203 1011

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 akan berakhir pada Tahun 2024, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan serentak secara nasional pada bulan Oktober Tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Berakhir pada Tahun 2024. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2024 sehingga Pemerintah Kabupaten Ende perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu Tahun 2025 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Renstra Bappeda Kabupaten Ende memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Bappeda Kabupaten Ende adalah salah satu Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Bappeda Kabupaten Ende menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Pembangunan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Berakhir pada Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende 2005– 2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018– 2023.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende 2011– 2031;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende 2019-2024;
16. Peraturan Bupati Ende Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Renstra Bappeda Kab. Ende Tahun 2024-2026 ini adalah untuk menyediakan pedoman perencanaan bagi Bappeda Kab. Ende yang mengacu pada Dokumen Perencanaan Daerah RPD Kab. Ende Tahun 2025-2026 pada masa transisi akhir masa jabatan Bupati Ende, sebelum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2030. Tujuan ditetapkannya Renstra Bappeda Kab. Ende Tahun 2024-2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan, sasaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 ke dalam Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kab. Ende.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.
3. Menjadikan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai dasar operasional penentuan program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.
4. Menjadikan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Bappeda disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Bappeda Kabupaten Ende,

Bab II paling sedikit memuat:

1. Tugas, fungsi dan struktur Bappeda Kab. Ende;
2. Sumber daya Bappeda Kab. Ende;
3. Kinerja pelayanan Bappeda Kab. Ende; dan
4. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Bappeda Kabupaten Ende, berisi:

1. Permasalahan pelayanan Bappeda Kab. Ende (berdasarkan capaian kinerja Bappeda Kab. Ende pada Bab II); dan
2. Isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran, berisi :

1. Tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Kab. Ende Tahun 2025-2026 yang penentuannya didasarkan pada:
 - a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026; dan/ atau
 - b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

2. Cascading kinerja Bappeda Kab. Ende mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan, menjabarkan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Ende dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan, berisi program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhirannya).

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, berisi :

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Kab. Ende tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)PD; dan
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi Bappeda Kab. Ende pemangku urusan pemerintahan daerah.

BAB VIII Penutup, berisi penutup Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024 disertai aturan pelaksanaannya.

2. 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ende dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende. Bappeda menyelenggarakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Ende, maka Bappeda mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintah daerah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan pembangunan I, perencanaan pembangunan II, perencanaan pembangunan III, dan perencanaan pembangunan IV berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkesinambungan.

Bappeda dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

1.	•Perumusan kebijakan teknis perencanaan
2.	•Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan
3.	•Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah
4.	•Pengkoordinasian penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
5.	•Pengkoordinasian penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
6.	•Pengkoordinasian penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD)
7.	•Penetapan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah
8.	•Pengkoordinasian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
9.	•Pengkoordinasian musyawarah pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
10.	•Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk merumuskan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
11.	•Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi perencanaan pembangunan dengan dinas/instansi/unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Ende
12.	•Pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan daerah
13.	•Pengumpulan, pengkajian dan penyajian data serta menyusun sistem informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah
14.	•Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bappeda memiliki peran sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat terdiri dari:

- a) Sekretaris
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c) Fungsional Perencana;
 - d) Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah.
3. Bidang Perencanaan Pembangunan I, terdiri dari :
- a) Kepala Bidang PP 1;
 - b) Fungsional Perencana;
4. Bidang Perencanaan Pembangunan II, terdiri dari :
- a) Kepala Bidang PP 2;
 - b) Fungsional Perencana;
5. Bidang Perencanaan Pembangunan III, terdiri dari :
- a) Kepala Bidang PP 3;
 - b) Fungsional Perencana.
6. Bidang Perencanaan Pembangunan IV, terdiri dari:
- a) Kepala Bidang PP 4
 - b) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - c) Fungsional Perencana.

Fungsi dan tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut:

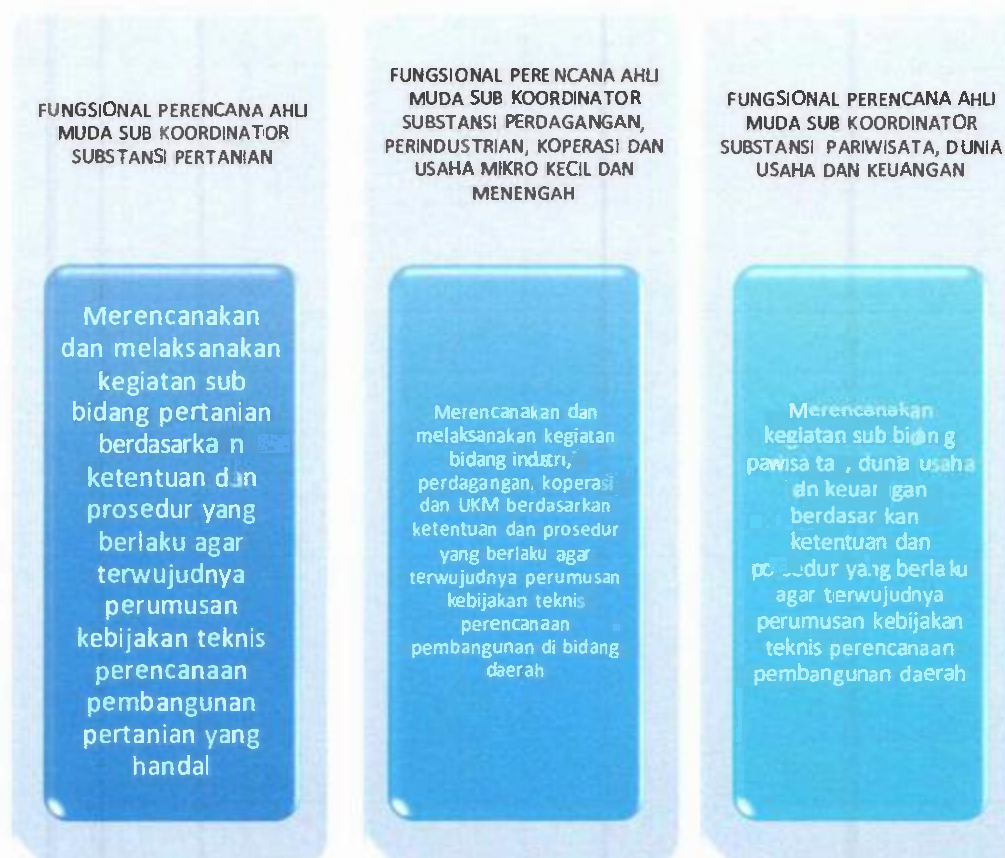
1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan badan serta mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Sekretaris dibantu oleh satu Sub Bagian yaitu kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, satu Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan serta satu Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Sub Koordinator Substansi Keuangan dengan tugas masing-masing terurai sebagai berikut :



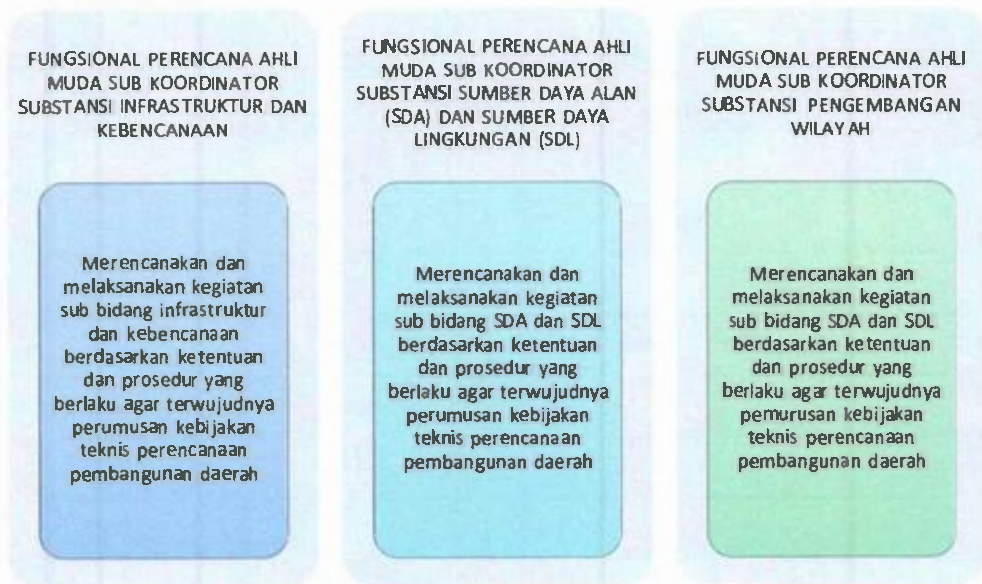
2. Bidang Perencanaan Pembangunan I

Bidang Perencanaan Pembangunan I mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merencanakan kegiatan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program perencanaan pembangunan I yang meliputi pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, pariwisata, dunia usaha, dan keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah. Bidang Perencanaan Pembangunan I dibantu oleh 3 (tiga) Fungsional Perencana Ahli Muda yaitu : Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Pertanian, Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Pariwisata, Dunia Usaha dan Keuangan dengan tugas masing-masing terurai sebagai berikut:



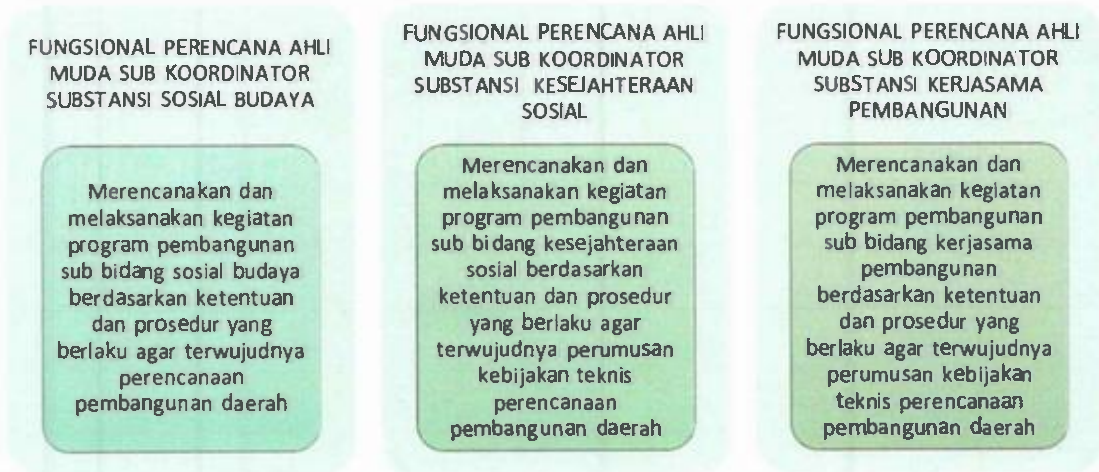
3. Bidang Perencanaan Pembangunan II

Bidang Perencanaan Pembangunan II mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program pembangunan di bidang infrastruktur dan kebencanaan, SDA dan SDL, pengembangan wilayah, pemukiman dan transmigrasi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di daerah. Bidang Perencanaan Pembangunan II membawahi 3 (tiga) Fungsional Perencana Muda yaitu Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Infrastruktur dan Kebencanaan, Fungsional Perencana Ahli Muda sub koordinator substansi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Lingkungan (SDL) dan Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Pengembangan Wilayah masing-masing dengan tugas sebagai berikut :



4. Bidang Perencanaan Pembangunan III

Bidang Perencanaan Pembangunan III mempunyai tugas membantu Kepala Badan merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan III meliputi sosial budaya, kesejahteraan sosial, dan kerjasama pembangunan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah. Bidang Perencanaan Pembangunan III membawahi Fungsional Perencana Ahli Muda sub koordinator substansi Sosial Budaya, Fungsional Perencana Ahli Muda sub koordinator substansi Kesejahteraan Sosial dan Fungsional Perencana Ahli Muda sub koordinator substansi Kerjasama Pembangunan masing-masing dengan tugas sebagai berikut :



5. Perencanaan Pembangunan IV

Bidang Perencanaan Pembangunan IV mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merencanakan dan melaksanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perencanaan pembangunan IV meliputi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku

agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah. Bidang Perencanaan Pembangunan IV membawahi 2 (dua) Fungsional yaitu Fungsional Perencana Ahli Muda sub koordinator Substansi Perencanaan Pembangunan, Fungsional Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Pengendalian Dan Evaluasi dan 1 (satu) Sub Bidang Penelitian Dan Pengembangan masing-masing dengan tugas sebagai berikut :



Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Ende



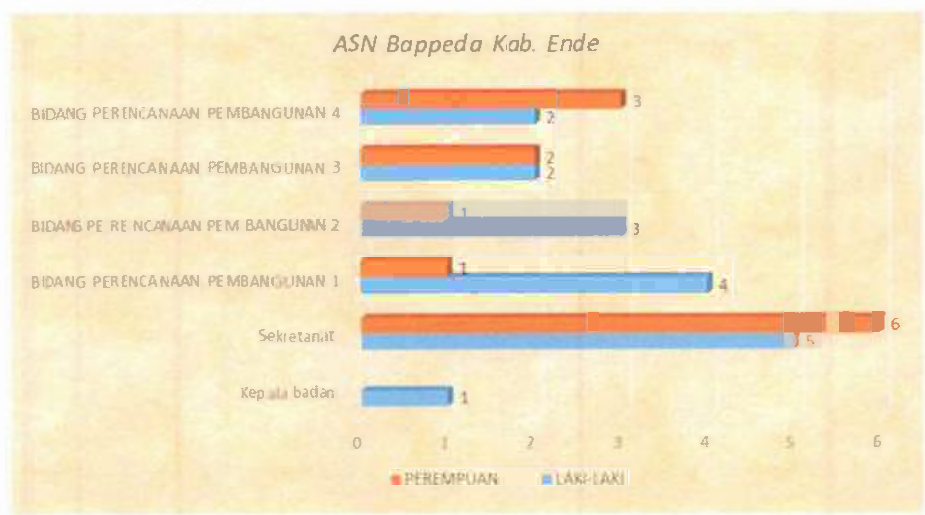
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain Sumber Daya Manusia, sumber daya sarana dan prasarana yang terdiri atas aset tetap dan aset bergerak lainnya serta sumber daya keuangan yang merupakan sumber pembiayaan seluruh program dan kegiatan SKPD.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (ASN)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bappeda Kabupaten Ende didukung oleh 52 orang pegawai (keadaan Desember 2021) yang terdiri dari 30 orang PNS, 4 orang Tenaga Kontrak Daerah dan 18 orang Tenaga Kontrak Kegiatan. Perkembangan dan potensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang perencanaan pembangunan daerah dapat digambarkan:

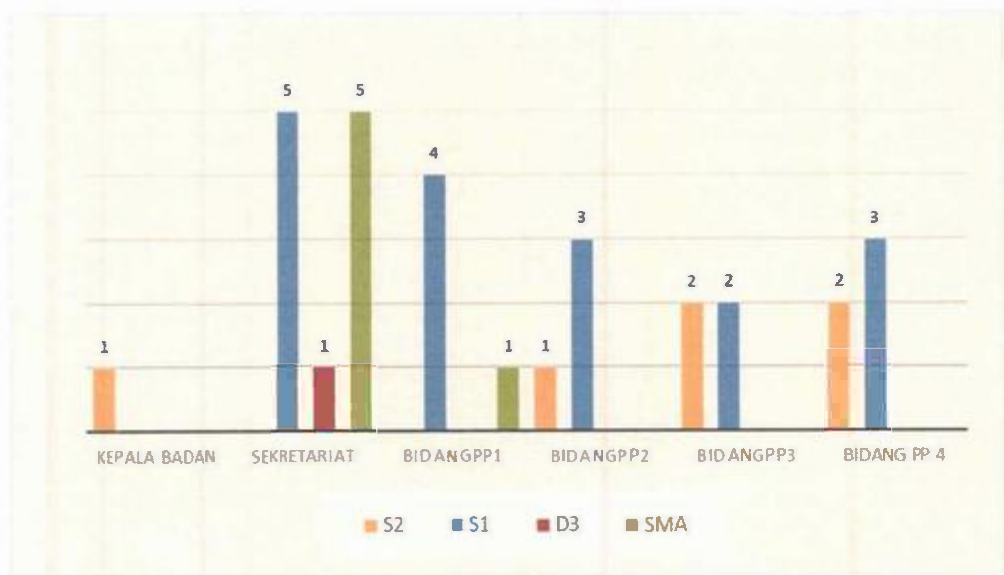
Gambar 2. 2. ASN Bappeda Kab. Ende berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Untuk tingkat pendidikan ASN Bappeda Kabupaten Ende keadaan Agustus Tahun 2021, diperoleh rasio sebagai berikut: berpendidikan Pasca Sarjana (S2) 20,00%, Sarjana (S1) 56,57%, Diploma III 3,33% dan SMA 20,00%. Hal ini menunjukkan bahwa sumberdaya manusia ASN Bappeda setidaknya memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di dalam menentukan proses perencanaan pembangunan serta mensinergikan program/kegiatan antar Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Ende.

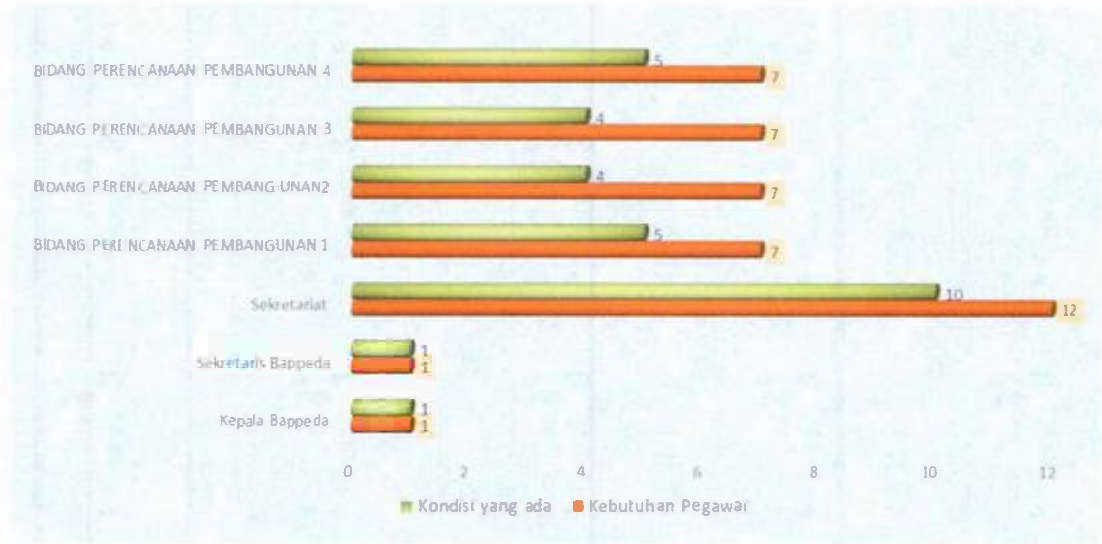
Gambar 2. 3. ASN Bappeda Kab. Ende berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jika dibandingkan antara kondisi jumlah pegawai saat ini yaitu 52 orang dengan kebutuhan pegawai sesuai dengan analisis beban kerja maka rata-rata jumlah pegawai baik di Sekretariat maupun di masing-masing Bidang mencapai 76,67%. Kondisi ini sudah disiasati dengan merekrut tenaga non PNS (stat pendukung/tenaga kontrak kegiatan) namun belum mencapai jumlah yang dibutuhkan.

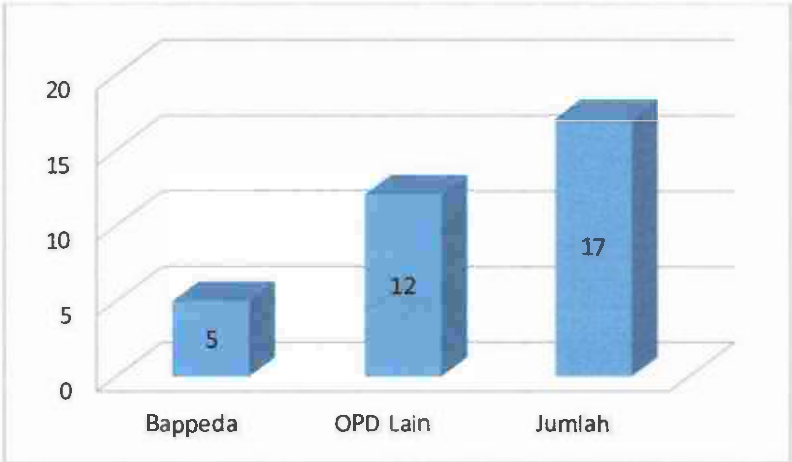
Gambar 2. 4. Komposisi Kebutuhan Pegawai di Bappeda Kabupaten Ende



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dalam mendukung tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Ende juga ikut serta mengirim aparaturnya untuk mengikuti Diklat Fungsional Perencana yang diselenggarakan oleh Pusbindiklatren Bappenas. Namun dengan adanya promosi jabatan dan mutasi pegawai beberapa diantaranya telah berpindah tugas pada OPD lain, sehingga tenaga yang tersedia saat ini diharapkan mampu melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel. Dari sisi kuantitas sumberdaya yang tersedia belum cukup memadai untuk melakukan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, oleh karena itu untuk menghasilkan rencana pembangunan daerah yang berkualitas maka Bappeda Kabupaten Ende harus mampu menyediakan tenaga perencana yang berkualitas.

Gambar 2.5. PNS yang telah mengikuti Diklat Fungsional Perencana



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Bappeda

Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1. Kondisi Aset Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2023

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Tanah	1 bidang	1	-	-	Luasnya 1.145 M ² / no.sertifikat BB 289699 (P.56)
2.	Bangunan gedung	12 ruangan	10	2	-	Ruangan kepala, sekretaris, sekretariat, bendahara/keuangan, arsip, rapat, gudang, bidang PP I, bidang PP II dan bidang PP III masing-masing 1 ruangan ditambah dengan 2 ruangan bidang PP IV
3.	Kendaraan dinas	31 buah	17	4	10	Kendaraan Roda Empat sebanyak 5 buah dan Roda Dua sebanyak 26 buah. Kendaraan Roda Empat sebanyak 4 buah digunakan di Bappeda dalam kondisi baik dan 1 buah berada di SKPD lain dengan kondisi rusak berat. Kendaraan Roda Dua dengan kondisi baik 13 buah, kondisi rusak ringan 4 buah dan kondisi rusak berat 9 buah
4	Komputer Laptop/ Notebook	37 unit	13	-	24	Laptop/ Notebook berjumlah 37 unit. Dari jumlah 24 buah rusak berat sebanyak 18 buah hilang.
5	Komputer / PC	23 unit	16	-	7	Komputer / PC berjumlah 23 unit. Kondisi baik sebanyak 16 unit dan rusak berat sebanyak 7 unit
6	AC	12 unit	7	-	5	AC berjumlah 12 unit. Kondisi baik sebanyak 7 unit, rusak berat sebanyak 5 unit
7	TVberwama	2 buah	2			Televisi berwarna berjumlah 2 buah dengan kondisi baik
8	LCD Proyektor	6 buah	6	-	-	LCD Proyektor berjumlah 6 buah dalam kondisi baik.
9	Camera Film	4 buah	-		4	Camera Film berjumlah 4 buah rusak berat
10	Handycam	5 buah	-	-	5	Handycam berjumlah 5 buah rusak berat
11	Wireless	2 buah	-	1	1	Wireless berjumlah 2 buah. Kondisi rusak ringan 1 buah dan rusak berat 1 buah
12	Filling Besi / Metal	16 buah	8	-	8	Filling Besi / Metal berjumlah 16 buah. Kondisi baik sebanyak 8 buah dan rusak berat sebanyak 8 buah
13	Lemari Kayu/Besi	20 buah	15	-	5	Lemari Kayu / Besi berjumlah 20 buah. Kondisi baik sebanyak 15 buah dan rusak berat sebanyak 5 buah
14	Meja kursi tamu	1 set	1			Meja Kursi Tamu berjumlah 1 set dengan kondisi baik
15	Meja kerja	50 buah	34	-	6	Meja Kerja berjumlah 50 buah. Kondisi baik sebanyak 34 buah dan rusak berat sebanyak 16 buah
16	Kursi kerja	58 buah	43	-	15	Kursi Kerja berjumlah 58 buah terdiri dari kursi putar sebanyak 6 buah dalam kondisi baik, kursi kayu sebanyak 52 buah yaitu 37 buah dengan kondisi baik dan 15 buah rusak berat
17	Meja rapat	21 buah	21	-	-	Meja Rapat berjumlah 19 buah dengan kondisi baik

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
18	Kursi rapat	85 buah	83	-	2	Kursi Rapat berjumlah 85 buah. Kondisi baik sebanyak 83 buah dan rusak berat sebanyak 2 buah
19	White board	5 buah	5	-	-	Whiteboard berjumlah 5 buah dengan kondisi baik
20	Kipas angin	3 buah	1		2	Kipas Angin berjumlah 3 buah. Kondisi baik sebanyak 1 buah dan rusak berat sebanyak 2 buah
21	Pesawat telepon	15 buah	6		9	Pesawat Telepon berjumlah 15 buah. Kondisi baik sebanyak 6 buah dan rusak berat sebanyak 9 buah
22	Mesin Faxcimile	1 buah	1	-	-	Mesin Faxcimile berjumlah 1 buah dengan kondisi baik
23	Printer	23 buah	17	-	6	Printer berjumlah 23 buah. Kondisi baik sebanyak 17 buah dan rusak berat sebanyak 6 buah
24	Router	2 buah	2	-	-	Router sebanyak 2 buah dengan kondisi baik
25	Mesin Finger Print	2 buah	2	-	-	Mesin Finger Print sebanyak 2 buah dengan kondisi baik
26	CCTV	1 Set	1	-	-	CCTV 1 set terdiri dari 1 monitor, 4 kamera dalam kondisi baik
27	Server	1 Paket	1	-	-	Server dipinjam pakai oleh Diskominfo
28	Hardisk External	4 buah	1	-	3	Hardisk External berjumlah 4, 1 buah dengan kondisi baik, 3 buah dengan kondisi rusak berat
29	Mesin Pemotong Rumput	1 buah	1			Mesin Pemotong Rumput berjumlah 1 buah dengan kondisi baik
30	Sound Sistem	2 paket	1		1	Sound Sistem berjumlah 2 paket. Kondisi baik sebanyak 1 paket dan rusak berat sebanyak 1 paket

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dalam menjalankan tupoksinya Bappeda memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Ende saat ini yaitu gedung kantor dilengkapi oleh ruang rapat kepala dan ruang rapat Bappeda, dan beberapa ruang lain yang digunakan untuk sekretariat dan bidang-bidang. Namun jika dilihat dari jumlah pegawai Bappeda dan jumlah bidang yang ada maka ruangan yang ditempati saat ini belum memadai, idealnya tiap bidang memiliki ruang rapat tersendiri sehingga penyelenggaraan rapat internal bidang, rapat koordinasi atau forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan di Kantor Bappeda dapat terlaksana serentak dan lancar. Kebutuhan lainnya yaitu belum memadainya ruangan arsip dan ruang untuk gudang, karena sebagai institusi yang selalu menghasilkan dokumen perencanaan tentu memiliki jumlah arsip dan dokumen yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Perangkat Daerah lain. Sarana lainnya yang masih belum dimiliki adalah ruang perpustakaan internal tempat menyimpan dan mengelola berbagai referensi, jurnal dan

buku, serta dokumen perencanaan yang telah disusun, serta dibutuhkan pula ruang arsip yang cukup besar untuk menyimpan arsip aktif Bappeda. Oleh karena itu Bappeda Kabupaten Ende membutuhkan pengembangan gedung kantor untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan oleh Bappeda adalah perangkat pendukung untuk pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data dan informasi (SIPD). Data dan informasi menjadi hal yang vital bagi proses penyusunan produk-produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu Bappeda selalu berusaha untuk melengkapi berbagai data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan, yang berasal dari berbagai sumber diantaranya: Pemerintah Pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, SKPD Lingkup Kabupaten Ende, dan BPS. Belum memadainya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan data dapat menjadi salah satu kendala dalam proses penyusunan perencanaan, dan menjadikan ketersediaan dan kualitas data yang ada dilihat validitas dan realibilitas masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini disebabkan beberapa hal, diantaranya: belum adanya bidang khusus yang menangani data, adanya jeda waktu ketersediaan data, belum terdapat konsep kesepakatan dan kesamaan data yakni perolehan data dan pengolahan data dari Perangkat Daerah belum optimal serta perlu dikoordinasi dengan baik, dan masih perlu dioptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengolahan data menjadi Informasi. Bappeda membutuhkan server untuk SIPD dan pengadaan komputer PC yang dikhususkan sebagai pusat data Bappeda Kabupaten Ende. Selain itu untuk mendukung kinerja Bappeda juga membutuhkan penambahan peralatan kantor PC, Laptop, printer, infocus serta perlengkapan kantor lainnya.

2. 2. 3. Keuangan

Bappeda Kabupaten Ende pada tahun 2020 mendapat alokasi anggaran belanja untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020. Alokasi anggaran ini digunakan untuk membiayai seluruh program/ kegiatan yang telah direncanakan. Secara lebih jelasnya kondisi keuangan Bappeda Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Bappeda Kabupaten Ende 2022-2023

URAIAN	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)	
	2022	2023	2022	2023
BELANJA	5.148.353.566	3.084.717.559	4.967.783.528	2.972.218.570
BELANJA OPERASI	4.783.204.816	3.084.717.559	4.602.673.528	2.972.218.570
BELANJA PEGAWAI	2.481.493.686	2.233.617.909	2.397.939.923	2.174.844.214
BELANJA BARANG DANJASA	2.301.711.130	851.099.650	2.204.733.605	797.374.356
BELANJA MODAL	365.148.750	0	365.110.000	0
BELANJA MODAL PERALATAN MESIN	142.218.750		142.180.000	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	222.930.000		222.930.000	

Sumber : Sub Bagian Keuangan

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Ende selama 2 tahun periode Renstra (2019 sampai dengan 2024) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Ende

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Tahun Awal (%)	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Badan Yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan dengan baik	100	100	100	100	100	100	100	90,81	100	100		1,0	0,9	1,0	1,0	
2	Persentase ketersediaan SIPD	60	80	85	90	95	100	70	100	100	100		0,9	1,2	1,1	1,1	
3	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	50	100	100	100	100	100	100	100	100	10		1,0	1,0	1,0	0,1	
4	Persentase pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		1,0	1,0	1,0	1,0	
5	Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	83,09	100	100	100	100	100	100	100	90,56	100		1,0	1,0	0,9	1,0	
6	Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD	72,93	100	100	100	100	100	87,11	90,08	85,71	100		0,9	0,9	0,9	1,0	
7	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang dielapkan dengan Perda/Perkada (RPJPD, RPJMD, RKPD, RT(RW))	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		1,0	1,0	1,0	1,0	

Berdasarkan tabel 2.3. di atas, tergambar pada tahun 2023 terdapat 5 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) sudah tercapai 100% (sesuai target), 2 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) capaiannya kurang dari 100 % (tidak mencapai target).

Capaian masing-masing Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bappeda Kabupaten Ende dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase Badan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik.

Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah program/Kegiatan rutin yang dilaksanakan. Realisasi tahun 2023 sesuai target yaitu 100%, dengan rata-rata rasio capaiannya 1,00 (*kategori sangat tinggi*).

2. Persentase ketersediaan SIPD

Indikator ini diukur dengan menghitung tahapan perencanaan dengan realisasi penggunaan aplikasi SIPD Perencanaan. Realisasi tahun 2023 pencapaian sebesar 100% dari target sebesar 95 % atau capaian kinerja sebesar 100 %. Hal ini diakibatkan Aplikasi SIPD terus mengalami pembaharuan baik dalam pentahapan perencanaan maupun nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang terus mengalami penyempurnaan.

3. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah kerjasama penelitian yang dilaksanakan setiap tahun dengan jumlah kerjasama penelitian yang harus dilaksanakan setiap tahun. Pada tahun 2023 tidak ada kerjasama penelitian yang dilaksanakan sebagai akibat keterbatasan anggaran. Sehingga realisasi pencapaian 10% dari target sebesar 100%. Rata-rata rasio capaian tahun 2023 sebesar 0,1 (*kategori sangat rendah*).

4. Persentase pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi hasil penelitian isu-isu strategis daerah yang ditindaklanjuti pada tahun 2022 dengan jumlah rekomendasi hasil penelitian yang perlu dilaksanakan pada tahun 2023. Realisasi pada tahun 2023 sesuai target yaitu 100%, dengan rata-rata rasio capaiannya 1,00 (*kategori sangat tinggi*). Rekomendasinya sudah ditindaklanjuti dalam melaksanakan program kegiatan OPD terkait pada tahun 2023

5. Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah program yang ada dalam RKPD dengan jumlah Program dalam RPJMD. Realisasi tahun 2023 dengan rasio capaiannya 1,00 (*kategori tinggi s/d sangat tinggi*).

6. Persentase kegiatan yang ditetapkan dalam APBD berbanding dengan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah kegiatan yang dianggarkan dalam APBD dengan jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RKPD. Realisasi tahun 2023 dengan rasio capaiannya 1,0.

7. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada (RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW).

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ada dengan jumlah dokumen perencanaan yang diwajibkan. Realisasi tahun 2020 sesuai target yaitu 100%, rata-rata rasio capaiannya 1,00 (*kategori sangat tinggi*).

Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Bappeda Kabupaten Ende dapat dilihat pada Tabel 2.4. dan Tabel 2.5. sebagai berikut:

Tabel 2. 4. Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2022 – 20223

URAIAN	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
BELANJA	5.148.353.566	3.084.717.559	4.967.783.528	2.972.218.570	0,9649	0,9635
BELANJA OPERASI	4.783.204.816	3.084.717.559	4.602.673.528	2.972.218.570	0,9623	0,9635
BELANJA PEGAWAI	2.481.493.686	2.333.617.909	2.397.939.923	2.174.844.214	0,9663	0,9737
BELANJA BARANG DAN JASA	2.301.711.130	851.099.650	2.204.733.605	797.374.356	0,9579	0,9369
BELANJA MODAL	365.148.750	0	365.110.000	0	0,9999	
BELANJA MODAL PERALATAN MESIN	142.218.750		142.180.000		0,9997	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	222.930.000		222.930.000		1,0000	

Tabel 2. 5. Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Program Kegiatan Pelayanan Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2022 – 2022

URAIAN	Anggaran pada Tahun (Rp)			Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	7	8	12,00	13,00	17	18	
BAPPEDA	5.148.353.566		4.967.783.528		0,96	0,96	-0,40	-0,40	
URUSAN PERENCANAAN	5.042.353.566		4.890.643.748		0,97	0,96	-0,39	-0,39	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.658.731.536	2.507.217.909	3.551.302.613	2.413.633.659	0,97	0,96	-0,31	-0,32	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.000.000	14.000.000	43.894.600	13.996.600	0,95	1,00	-0,70	-0,68	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.000.000	10.000.000	32.880.000	9.999.800	1,00	1,00	-0,70	-0,70	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.600.000	500.000	1.571.000	497.000	0,98	0,99	-0,69	-0,68	
Sub Kegiatan Ka.rdinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000	500.000	1.480.000	500.000	0,99	1,00	-0,67	-0,66	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000	500.000	508.800	500.000	0,34	1,00	-0,67	-0,02	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.400.000	500.000	2.558.000	500.000	0,75	1,00	-0,85	-0,80	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	1.000.000	2.492.000	999.800	1,00	1,00	-0,60	-0,60	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	1000000	2.404.800	1.000.000	0,96	1,00	-0,60	-0,58	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.485.121.166	2.249.617.909	2.401.184.323	2.190.824.214	0,97	0,97	-0,09	-0,09	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.433.853.686	2.227.317.909	2.350.299.923	2.168.544.214	0,97	0,97	-0,08	-0,08	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.267.480	21.300.000	44.148.400	21.282.000	1,00	1,00	-0,52	-0,52	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.500.000	500.000	2.456.000	499.000	0,98	1,00	-0,80	-0,80	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	2.500.000	500.000	2.284.000	499.000	0,91	1,00	-0,80	-0,78	

URAIAN	Anggaran pada Tahun (Rp)			Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2022	2023		2022	2023	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3		7	8	12,00	13,00	17	18
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	1.000.000		1.996.000	1.000.000	1,00	1,00	-0,50	-0,50
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.366.000	1.000.000		8.462.000	1.000.000	0,90	1,00	-0,89	-0,88
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.166.000			1.262.000		0,58		-1,00	-1,00
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.200.000	1.000.000		7.200.006	1.000.000	1,06	1,00	-0,86	-0,86
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.500.000	2.000.000		1.892.000	1.951.800	0,76	0,98	-0,20	0,03
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.000.000	1.000.000		952.000	952.006	0,95	0,95	0,00	0,00
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.500.000	1.000.000		940.000	999.800	0,63	1,00	-0,33	0,06
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	227.430.000	97.200.000		225.818.555	96.272.606	0,99	0,99	-0,57	-0,57
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	3.480.000			3.130.000		0,90		-1,00	-1,00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.950.000	97.200.000		222.688.555	96.272.600	0,99	0,99	-0,57	-0,57
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	288.828.750			288.790.000		1,00		-1,00	-1,00
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.218.750			50.180.006		1,00		-1,00	-1,00
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	238.610.000			238.610.000		1,00		-1,00	-1,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	458.685.620	100.400.000		453.127.527	66.673.184	0,99	0,66	-0,78	-0,85
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.000.000			1.000.000				
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.835.620	67.000.000		81.277.527	65.673.184	0,94	0,98	-0,23	-0,19
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	371.850.000	32.400.000		371.850.000	-	1,00	0,00	-0,91	-1,00

URAIAN	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	7	8	12,00	13,00	17	18
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140.800.000	43.000.000	128.133.608	42.915.261	0,91	1,00	-0,69	-0,67
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	10.000.000	22.386.228	9.954.733	0,75	1,00	-0,67	-0,56
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	70.500.000	28.000.000	65.454.480	27.978.028	0,93	1,00	-0,60	-0,57
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		4.000.000		4.000.000				
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	40.300.000	1.000.000	40.292.900	982.500	1,00	0,98	-0,98	-0,98
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	523.781.130	447.500.000	516.268.543	432.758.311	0,99	0,97	-0,15	-0,16
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	399.407.930	424.503.600	398.572.143	409.761.911	1,00	0,97	0,06	0,03
Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	16.000.000		15.992.000		1,00		-1,00	-1,00
Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	18.110.000		17.828.759		0,98		-1,00	-1,00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik		10.234.000		10.234.000				
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	22.824.000	45.763.000	22.784.000	43.369.000	1,00	0,95	1,01	0,90
Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	41.753.000	5.614.000	41.720.000	5.389.000	1,00	0,96	-0,87	-0,87
Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	11.773.800	5.920.800	11.411.800	5.920.800	0,97	1,00	-0,50	-0,48
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	288.947.130	356.971.800	288.835.584	344.849.111	1,00	0,97	0,24	0,19
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40.943.200	15.496.400	40.943.200	15.496.400	1,00	1,00	-0,62	-0,62

URAIAN	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	7	8	12,00	13,00	17	18
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	18.443.200	15.496.400	18.443.200	15.496.400	1,00	1,00	-0,16	-0,16
Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Ende	22.500.000		22.500.000		1,00		-1,00	-1,00
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	83.430.000	7.500.000	76.753.200	7.500.000	0,92	1,00	-0,91	-0,90
Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	18.009.800	1.500.000	11.746.000	1.500.000	0,65	1,00	-0,92	-0,87
Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	10.000.000	1.000.000	9.622.000	1.000.000	0,96	1,00	-0,90	-0,90
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	55.420.200	5.000.000	55.385.200	5.000.000	1,00	1,00	-0,91	-0,91
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	859.840.900	127.499.650	823.072.592	123.278.800	0,96	0,97	-0,85	-0,85
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	257.499.900	45.500.000	247.342.584	43.958.000	0,96	0,97	-0,82	-0,82
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPd)	16.589.000	8.809.000	16.574.000	8.808.000	1,00	1,00	-0,47	-0,47
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	17.244.000	1.355.000	15.353.000	1.354.000	0,89	1,00	-0,92	-0,91
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11.259.000	6.212.500	11.207.000	6.212.500	1,00	1,00	-0,45	-0,45
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		844.000		214.000				
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, RKPd)	9.662.000	8.627.500	9.549.000	8.627.500	0,99	1,00	-0,11	-0,10

URAIAN	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	7	8	12,00	13,00	17	18
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13.635.000	1.052.000	12.992.000	872.000	0,95	0,83	-0,92	-0,93
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.404.000	4.780.000	13.038.000	4.780.000	0,91	1,00	-0,67	-0,63
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	174.706.900	13.820.000	168.629.584	13.090.000	0,97	0,95	-0,92	-0,92
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	432.340.000	51.924.000	411.344.866	49.248.200	0,95	0,95	-0,88	-0,88
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	20.000.000	8.988.000	19.415.000	8.716.000	0,97	0,97	-0,55	-0,55
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	16.000.000	1.010.000	14.060.800	1.009.000	0,88	1,00	-0,94	-0,93
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	20.000.000	5.473.000	19.626.800	5.147.000	0,98	0,94	-0,73	-0,74
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	325.340.000	26.465.000	312.316.266	25.244.800	0,96	0,95	-0,92	-0,92
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, RKPD)	20.000.000	6.488.000	17.889.000	6.234.000	0,89	0,96	-0,68	-0,65
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	16.000.000	1.000.000	13.377.000	999.000	0,84	1,00	-0,94	-0,93
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	15.000.000	1.500.000	14.660.000	898.600	0,98	0,60	-0,90	-0,94
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		1.000.000		999.800				

URAIAN	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	7	8	12,00	13,00	17	18
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	170.001.000	30.075.650	164.385.142	30.072.600	0,97	1,00	-0,82	-0,82
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD)	29.283.000	7.103.000	29.181.100	7.103.000	1,00	1,00	-0,76	-0,76
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.625.000	1.027.000	5.210.000	1.027.000	0,93	1,00	-0,82	-0,80
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	25.000.000	8.179.650	24.964.800	8.178.600	1,00	1,00	-0,67	-0,67
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	30.044.000	3.609.000	29.698.300	3.609.000	0,99	1,00	-0,88	-0,88
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	19.231.000	6.240.000	18.296.506	6.240.000	0,95	1,00	-0,68	-0,66
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	16.380.000	1.024.000	15.386.000	1.024.000	0,94	1,00	-0,94	-0,93
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	25.376.000	955.000	25.159.800	953.000	0,99	1,00	-0,96	-0,96
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	19.062.000	1.938.000	16.488.636	1.938.000	0,87	1,00	-0,90	-0,88
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	106.000.000	2.500.000	77.139.780	2.499.800	0,73	0,9999	-0,98	-0,97
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	106.000.000	2.500.000	77.139.780	2.499.800	0,73	1,00	-0,98	-0,97
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		2.500.000		2.499.800		0,9999		
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		2.500.000		2.499.800		0,9999		
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	51.000.000		50.989.000		1,00		-1,00	-1,00

URAIAN	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	7	8	12,00	13,00	17	18
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	51.000.000		50.989.000		1,00		-1,00	-1,00
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	55.000.000		26.150.780		0,48		-1,00	-1,00
Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	5.000.000		-		0,00		-1,00	
Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	50.000.000		26.150.780		0,52		-1,00	-1,00

Tabel 2.4. menunjukkan bahwa rata-rata anggaran Belanja mengalami penurunan sebesar 40,01% dari tahun 2012.

Rata –rata penyerapan anggaran setiap tahun dari tahun 2022-2023 sebesar 96,42%. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan Bappeda Kabupaten Ende.

Sedangkan pada Tabel 2.5. menunjukkan perkembangan pendanaan program di Bappeda Kabupaten Ende dimana rasio antara realisasi dan anggaran pada urusan Rutin dan urusan Perencanaan Pembangunan berkisar antara 0,96 – 0,979. Hal tersebut menandakan penyerapan anggaran untuk mencapai output tergolong tinggi. Namun jika dilihat per program, rasio realisasi terhadap anggaran mengalami fluktuasi. Rata-rata anggaran untuk urusan Rutin turun 31,47 % sedangkan realisasinya turun sebesar 32,04 % dan untuk Urusan Perencanaan Pembangunan pada pagu anggaran rata rata pertumbuhan turun sebesar 50%, dan realisasinya mengalami penurunan sebesar 51 %.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Bappeda Kabupaten Ende

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende menyelenggarakan fungsi layanan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende berikut *stakeholder*-nya dan seluruh masyarakat Kabupaten Ende yang tersebar di 21 Kecamatan, dan 278 desa/kelurahan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem pembangunan daerah, yakni berfungsi sebagai pengarah untuk memberikan rambu-rambu kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai tujuan pembangunan secara bertahap.

Karenanya dengan perencanaan bisa menjadi dasar arah dan prioritas pembangunan dan pengembangan daerah dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende berusaha menjangkau seluruh komponen masyarakat dengan membuka akses informasi perencanaan Pembangunan Daerah secara digital melalui aplikasi SIPD sehingga lebih terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Ouput layanan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah berupa fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah, fasilitasi data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dokumen, dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta hasil kajian penelitian/inovasi dan pengembangan daerah. Data, proses dan dokumen bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende mempunyai peran yang penting dan strategis.

Data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Dengan data yang berperan sebagai informasi merupakan bahan untuk menetapkan arah kebijakan perencanaan pembangunan yang lebih baik. Data sangat diperlukan untuk menyusun sebuah perencanaan pembangunan yang baik sebagai dasar penetapan target dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran.

Berkaitan dengan Indikator SDGs dalam penerapan teknologi dan inovasi, Perangkat Daerah berupaya memberikan nilai tambah kepada pengguna layanan, yaitu berupa nilai kemudahan dan efisiensi dalam pelayanan. Selain itu, bagi masyarakat pengguna inovasi, efisiensi waktu dan kemudahan bisa meminimalkan terjadinya *opportunity lost* dalam beraktifitas. Nilai tambah dalam konteks inovasi tidak semua bisa diukur dengan angka, ini berbeda dengan nilai tambah yang sering digunakan dalam konteks ekonomi dan bisnis dimana mengukur nilai tambah bisa menggunakan

pendekatan kuantitatif terhadap produk yang dijual. Munculnya inovasi ini membuktikan adanya perkembangan yang positif di sektor publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (khususnya pelayanan publik) yang memperhatikan penciptaan nilai publik. Hal ini menunjukkan telah terjadi adopsi pendekatan *network community governance* yang menempatkan masyarakat dalam posisi yang utama dalam pelayanan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih terdapat inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
2. Perlu dilakukan kajian terkait tata ruang wilayah dalam perumusan rencana pembangunan;
3. Belum memadainya SDM perencana baik kualitas dan kuantitasnya baik di tingkat OPD maupun di tingkat Kecamatan dan Desa dalam memahami sistem perencanaan dan penganggaran maupun pelaksanaan dan pengendalian terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan;
4. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai umpan balik dalam perencanaan selanjutnya;
5. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal;
6. Perumusan kebijakan pembangunan belum dilakukan melalui kajian akademis yang mendalam;
7. Inovasi daerah belum dikembangkan secara sistematis.

Tabel 3. 1. Pemetaan Permasalahan Bappeda Kabupaten Ende

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih ditemukan inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga perencanaan pembangunan	Belum optimalnya layanan administrasi dan pemenuhan sarana dan prasarana
	Belum selarasnya dokumen perencanaan dan penganggaran	Ketersediaan data dan informasi yang mendukung perencanaan belum optimal; Belum maksimal pemanfaatan IT dalam penyusunan dan pengolahan data dan informasi perencanaan; Kualitas SDM perencana belum memadai; Belum optimalnya pendampingan penyusunan dokumen rencana; Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan belum optimal; kualitas musrenbang pada tiap tahapnya belum optimal; Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
	Belum optimal pelaksanaan pengendalian dan evaluasi	Belum optimal sistem pengendalian dan evaluasi; Pemanfaatan hasil evaluasi dan pengendalian sebagai input perencanaan belum optimal
	Perumusan kebijakan pembangunan belum dilakukan melalui kajian akademis yang mendalam	Belum optimal penyediaan data/informasi yang mendukung penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; Belum optimal koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan

3.2. Isu-Isu Strategis

Isu strategis bagi Bappeda diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappeda di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka dirumuskan isu strategis Bappeda Kabupaten Ende, yaitu:

1. Masih rendahnya Kualitas proses perencanaan.
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai umpan balik penyusunan rencana pembangunan daerah tahun berikutnya.
3. Belum optimalnya Penyediaan data dan informasi yang valid dan akuntabel untuk digunakan dalam perumusan rencana pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2025-2026

Mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- 4.1. 1. Tujuan:
- Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Akuntabel dan Berkelanjutan

4.1.2. Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende
2. Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan
3. Meningkatnya kesesuaian muatan antara Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
5. Meningkatnya Pemanfaatan hasil kelitbangan

4.2. Cascading Kinerja

Mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 adalah sebagai tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Ende

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal Perencana naan	Target		Target Akhir
				2025	2026	
Tujuan:						
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Akuntabel dan Berkelanjutan	Persentase Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	%	79%	100%	100%	100%
Sasaran 1:						
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende	Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ende	Nilai		B	B	B
Sasaran Program :						
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara Baik						
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun		100%	100%	100%	100%

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal Perencana naan	Target		Target Akhir
				2025	2026	
Sasaran 2:						
Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan	Persentasi Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100%	100%	100%	100%
Sasaran Program :						
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah						
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100%	100%	100%	100%
Sasaran 3:						
Meningkatnya kesesuaian muatan antara Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%		100%	100%	100%
Sasaran Program :						
Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan						
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	100%	100%	100%
Sasaran 4:						
Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase program yang capaian kinerjanya Sangat Baik	%		85%	90%	90%
Sasaran Program :						
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah						
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		100%	100%	100%	100%
Sasaran 5:						
Meningkatnya Pemanfaatan hasil keli.tbangan	Persentase kajian yang digunakan dalam perumusan perencanaan pembangunan	%		100%	100%	100%
Sasaran Program:						
Tersedianya Data dan Informasi Kajian Litbang yang dapat digunakan dalam Perumusan Rencana Pembangunan						
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tersedianya data dan informasi kajian litbang yang dapat digunakan dalam perumusan rencana pembangunan	Dokume n	1	1	1	3

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Strategi dan kebijakan Bappeda Kabupaten Ende tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		KEBIJAKAN	
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Akuntabel dan Berkelanjutan	1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende	1	Meningkatkan pelayanan administrasi yang didukung sarana dan prasarana yang memadai	1	Peningkatan layanan administrasi serta pemenuhan sarana dan prasarana
				2	2	Peningkatan kualitas aparatur
					3	Pengembangan sistem pelaporan yang valid dan akurat
	2	Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan	3	Memperkuat sistem perencanaan pembangunan daerah	4	Validasi data dan informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan
					5	Peningkatan kualitas SDM perencanaan
					6	Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan
					7	Peningkatan kualitas Musrenbang pada tiap tahapannya
					8	Pemanfaatan IT dalam penyusunan dan pengolahan data dan informasi perencanaan
	3	Meningkatnya kesesuaian muatan antara Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4	Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	9	Pendampingan penyusunan dokumen rencana
					10	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
	4	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	5	Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	11	Peningkatan sistem perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah
					12	Pemanfaatan hasil evaluasi dan pengendalian sebagai input perencanaan selanjutnya
	5	Meningkatnya Pemanfaatan hasil kelitbangan	6	Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan	13	Peningkatan data penelitian dan pengembangan
					14	Peningkatan koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda, maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.1.

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2024 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Target		
						Target	Rp	Target	Rp				
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas Akuntabel dan Berkelanjutan													
Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan													
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks capaian Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	1.300.000.000	100%	1.325.000.000	100%	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan	100%	100%	1.069.844.000	100%	1.090.416.000	100%	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
		5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKD (sesuai kebutuhan jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	3 Dokumen	113.000	2 Dokumen	115.000	2 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
		5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	113.000	1 Dokumen	115.000	1 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
		5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	21 Berita Acara	21 Berita Acara	33.261.000	21 Berita Acara	33.901.000	21 Berita Acara	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
		5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	61.217.000	1 Berita Acara	62.394.000	1 Berita Acara	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
		5.01.02.2.01.0006	Penyajian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	600 Usulan	600 Usulan	67.538.000	600 Usulan	68.836.000	600 Usulan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	896.892.000	2 Dokumen	914.140.000	2 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keterisian data IKK SDGs SPM indikator program	%	90%	3.730.000	100%	3.802.000	100%	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	
		5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	0 Buku	1 Buku	2.374.000	1 Buku	2.420.000	1 Buku	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025	2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			
							Target	Rp		Target		
		5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	53 Orang	53 Orang	1.243.000	53 Orang	1.267.000	53 Orang	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	113.000	1 Dokumen	115.000	1 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	53 Orang	53 Orang	339.000	53 Orang	345.000	53 Orang	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			-		-		Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	113.000	1 Dokumen	115.000	1 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	0 Dokumen	1 Dokumen	113.000	1 Dokumen	115.000	1 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		Meningkatnya kesesuaian muatan antara Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah										
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	1.100.000.000	100%	1.150.000.000	100%	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	208.422.000	100%	217.048.000	100%	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	7 Laporan	115.789.000	7 Laporan	121.053.000	7 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target		
						Target	Rp	Target	Rp			
		5.01.03.2.0 1.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	7 Laporan	1.737.000	7 Laporan	1.816.000	7 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.03.2.0 1.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	7 Laporan	1.621.000	7 Laporan	1.695.000	7 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.03.2.0 1.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	23.158.000	3 Dokumen	24.211.000	3 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.03.2.0 1.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	32 Laporan	32 Laporan	2.779.000	32 Laporan	2.905.000	32 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.03.2.0 1.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	32 Laporan	32 Laporan	20.842.000	32 Laporan	21.789.000	32 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.03.2.0 1.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	32 Laporan	32 Laporan	6.947.000	32 Laporan	7.263.000	32 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.03.2.0 1.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	35.549.000	2 Dokumen	36.316.000	2 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.03.2.0 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	100%	553.474.000	100%	577.781.000	100%	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
5.01.03.2.0 2.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	11.579.000	3 Laporan	12.105.000	3 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target		
						Target	Rp	Target	Rp			
		5.01.03.2.0 2.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	13.895.000	3 Laporan	14.526.000	3 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.03.2.0 2.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	11.579.000	3 Laporan	12.105.000	3 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.03.2.0 2.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	46.316.000	3 Dokumen	48.421.000	3 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.03.2.0 2.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perencanaan	5 Laporan	5 Laporan	405.263.000	5 Laporan	422.835.000	5 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.03.2.0 2.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	5 Laporan	5 Laporan	18.526.000	5 Laporan	19.368.000	5 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.03.2.0 2.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	5 Laporan	5 Laporan	11.579.000	5 Laporan	12.105.000	5 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.03.2.0 2.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Perencanaan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	34.737.000	3 Dokumen	36.316.000	3 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.03.2.0 3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	338.104.000	100%	353.473.000	100%	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.03.2.0 3.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/lenja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan	3 Laporan	40.526.000	3 Laporan	42.368.000	3 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target		
						Target	Rp	Target	Rp	Target		
		5.01.03.2.0 3.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	3 Laporan	55.579.000	3 Laporan	58.105.000	3 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.03.2.0 3.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	3 Laporan	5.789.000	3 Laporan	6.053.000	3 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.03.2.0 3.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	3 Dokumen	3 Dokumen	69.474.000	3 Dokumen	72.632.000	3 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.03.2.0 3.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	40.526.000	3 Laporan	42.368.000	3 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.03.2.0 3.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	55.579.000	3 Laporan	58.105.000	3 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.03.2.0 3.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan	6.947.000	3 Laporan	7.263.000	3 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.03.2.0 3.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	3 Dokumen	3 Dokumen	63.684.000	3 Dokumen	66.579.000	3 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah												
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks capaian Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	1.300.000.000	100%	1.325.000.000	100%	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.02.2.0 3	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	226.087.000	100%	230.435.000	100%	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2025		2025				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target
						Target	Rp	Target	Rp			
		5.01.02.2.0 3.0003	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	180.870.000	4 Laporan	184.348.000	4 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.02.2.0 3.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	4 Kerja Sama	4 Kerja Sama	11.304.000	4 Kerja Sama	11.522.000	4 Kerja Sama	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.02.2.0 3.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	33.913.000	4 Laporan	34.565.000	4 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
Meningkatnya Pemanfaatan hasil keltbangan												
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tersedianya data dan informasi kajian litbang yang dapat digunakan dalam perumusan rencana pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	365.000.000	3 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.05.02.2.0 2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah kerjasama penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	1 Penelitian	0 Penelitian	-	1 Penelitian	200.000.000	2 Penelitian	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.05.02.2.0 2.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.05.02.2.0 2.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.05.02.2.0 3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah kerjasama penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan	0 Penelitian	1 Penelitian	200.000.000	0 Penelitian	-	1 Penelitian	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.05.02.2.0 3.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.05.02.2.0 4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi yang difasilitasi dalam pengembangannya	5 Satinov	2 Satinov	150.000.000	2 Satinov	165.000.000	12 Satinov	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.05.02.2.0 4.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	0 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	65.000.000	3 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.05.02.2.0 4.0003	Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	0 Laporan	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	2 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2025		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target		
						Target	Rp	Target	Rp			
		5.05.02.2.0 4.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Reproduksi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Reproduksi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.05.02.2.0 4.0001	Penelitian Pengembangan dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende												
		05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100%	100%	3.287.211,960	100%	3.321.872,758	100%	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85	95	6.391.995.000	100	6.405.375.800	100	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	15.905.860	3 Laporan	16.074.000	3 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	16 Laporan	10.603.910	16 Laporan	10.716.000	1616 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.650.980	1 Dokumen	2.679.000	1 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.650.980	1 Dokumen	2.679.000	1 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 1.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.650.980	1 Dokumen	2.679.000	1 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.651.000	1 Dokumen	2.679.000	1 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
				Target	Rp	Target	Rp	Target				
		5.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	26.509.770	3 Dokumen	26.547.758	3 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	245.821.652.000	100	247.211.800.000	100	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	10.603.910	1 Dokumen	10.716.000	1 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.603.910	12 Laporan	10.716.000	12 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 2.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1 Dokumen	10.603.910	1 Dokumen	10.716.000	1 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.952.930	1 Laporan	8.037.000	1 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1 Dokumen	5.301.950	1 Dokumen	5.358.000	1 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	15.905.860	12 Dokumen	16.074.000	12 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.383.228.670	32 Orang/bulan	2.408.358.000	32 Orang/bulan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	745.882.000	100	750.100.000	100	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
	5.01.01.2.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12 Laporan	5.301.950	12 Laporan	5.358.000	12 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Peninggung Jawab	Lokasi	
						Target	2025	Rp	Target	2025	Rp	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Target	
		5.01.01.2.0 3.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen	2.120.780	1 Dokumen	2.143.000	1 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende		
		5.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95	100	958.991.000	100	987.900.000	100	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende		
		5.01.01.2.0 5.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	2.120.780	12 Dokumen	2.143.000	12 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende		
		5.01.01.2.0 5.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	1 Dokumen	2.120.780	1 Dokumen	2.143.000	1 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende		
		5.01.01.2.0 5.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	3.181.170	1 Dokumen	3.215.000	1 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende		
		5.01.01.2.0 5.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	1 Unit	2.120.780	1 Unit	2.143.000	1 Unit	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende		
		5.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	19.811.437.000	100	19.931.400.000	100	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende		
		5.01.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.905.860	1 Dokumen	16.074.000	1 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende		
		5.01.01.2.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende		
		5.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	159.058.640	12 Laporan	160.736.000	12 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende		
5.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	1.060.390	1 Paket	1.072.000	1 Paket	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target		
						Target	Rp	Target	Rp			
		5.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	10.603.910	1 Paket	10.716.000	1 Paket	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1 Paket	10.603.910	1 Paket	10.716.000	1 Paket	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	4.241.563.000	100	4.286.400.000	100	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	15.905.860	1 Unit	16.074.000	3 Unit	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	15.905.860	1 Unit	16.074.000	3 Unit	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	10.603.910	1 Unit	10.716.000	3 Unit	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	18.220.851.000	100	18.324.000.000	100	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	53.019.550	12 Laporan	53.579.000	12 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	127.246.910	12 Laporan	128.589.000	12 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.060.390	1 Laporan	1.072.000	1 Laporan	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan Program (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Unit Kerja Peran'at Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2025		2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		
						Target	Rp	Target	Rp			
		5.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	34.097.499.000	100	34.290.400.000 0	100	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	10.603.910	1 Unit	10.716.000	1 Unit	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	53.019.550	1 Unit	53.579.000	1 Unit	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	53.019.550	1 Unit	53.579.000	1 Unit	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	8 Unit	21.207.820	8 Unit	21.431.000	9 Unit	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	3 Unit	116.643.010	3 Unit	117.873.000	3 Unit	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende
		5.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	84.831.280	1 Unit	85.726.000	1 Unit	Bappeda Kab. Ende	Kab. Ende

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Rumusan IKU Bappeda Kab. Ende beserta Indikator dan Target

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Ende dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Ukuran kinerja penyelenggaraan urusan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kab. Ende Tahun 2025-2026.

Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Bappeda Kab. Ende yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kab. Ende Tahun 2025-2026

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
					2025	2025	
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Akuntabel dan Berkelanjutan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ende	Nilai	B	B	B	B
	Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan	Persentasi Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100
	Meningkatnya kesesuaian muatan antara Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100	100	100	100
	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase program yang capaian kinerjanya Sangat Tinggi	%	n/a	85	90	90
	Meningkatnya Pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase kajian yang digunakan dalam perumusan perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100

Tabel 7. 2. Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kab. Ende Tahun 2025-2026

Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	2023	Target Kinerja Program		Kondisi Akhir RPD
					2025	2026	
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Secara Baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	%	100	100	100	100
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks	100	100	100	100

Sasaran Program	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	2023	Target Kinerja Program		Kondisi Akhir RPD
					2025	2006	
Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	100	100	100	100
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks	100	100	100	100
Tersedianya Data dan Informasi Kajian Litbang yang dapat digunakan dalam Perumusan Rencana Pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tersedianya data dan informasi kajian litbang yang dapat digunakan dalam perumusan rencana pembangunan	Dokumen	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Disamping itu Renstra ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan untuk 2 (dua) tahun kedepan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman dan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Bappeda sesuai dengan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan staf di lingkungan Bappeda Kabupaten Ende. Semoga Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Ende ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka "Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Akuntabel dan Berkelanjutan".

Kaidah Pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Ende 2025-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Ende 2025-2026. Atas dasar itu, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Ende ini adalah sebagai berikut :

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat pada Bappeda Kabupaten Ende berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Bappeda Kabupaten Ende Tahun 2025-2026;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Ende bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra Bappeda Kabupaten Ende; Pejabat eselon III di lingkungan Bappeda Kabupaten Ende bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Bappeda Kabupaten Ende; Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Bappeda Kabupaten Ende bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra Bappeda Kabupaten Ende;
3. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra ini harus dituangkan kembali kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Bappeda berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan/ sub kegiatan- sub kegiatan terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing sebagaimana terbaca/tersurat pada tabel 6.1 tentang Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan serta pendanaan Bappeda Kab. Ende tahun 2025– 2026.

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra maka Bappeda wajib melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2025-2026.

BUPATI ENDE

H. DJAFAR H. ACHMAD